KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kasus Ginjal Akut Muncul Lagi, Segera Tuntaskan!
Tanggal : Rabu, 08 Februari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Kasus Ginjal Akut Muncul Lagi, Segera Tuntaskan!

DUA kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA) kembali ditemukan di Jakarta. Satu anak meninggal dunia dan satu anak lagi dalam perawatan di RSCM Jakarta.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menyatakan, kembali munculnya dua kasus GGAPA menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Apalagi, kasus tersebut sempat nihil sejak November 2022.

"Kami menagih keseriusan yang dijanjikan Pemerintah untuk menangani kasus ini agar tidak terulang kembali," ujar Kurniasih dalam keterangannya, kemarin.

Kurniasih menjelaskan, satu pasien balita meninggal dunia setelah mengkonsumsi salah satu obat sirup penurun panas yang sebelumnya sudah masuk daftar aman dikonsumsi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sedangkan pasien kedua yang masih dirawat memiliki riwayat mengonsumsi obat sirup penurun panas secara mandiri.

Kurniasih mengungkapkan, berdasarkan laporan pasien mengalami demam tanggal 25 Januari, kemudian diberikan obat sirup penurun panas yang masuk merek aman oleh BPOM, selanjutnya tanggal 1 Februari pasien meninggal dunia.

"Gejalanya sangat mirip dengan kasus-kasus sebelumnya dan berlangsung cepat. Jadi harus segera diinvestigasi," tegas dia.

Untuk itu, politikus PKS ini meminta BPOM benar-benar serius melakukan investigasi jika ternyata benar pasien mengkonsumsi obat-obatan sirup yang sudah masuk daftar aman oleh BPOM.

Kurniasih juga mendesak BPOM memastikan semua obat yang beredar di pasaran itu benar-benar aman.

"Tolong, ini menyangkut nyawa anak-anak, bukan main-main," tegas legislator asal Dapil DKI Jakarta II ini.

Kurniasih bilang, belum lama ini para orang tua korban GGAPA mencari keadilan hingga ke DPR. Mereka mencari keadilan bukan hanya untuk diri sendiri tapi agar orang tua lain tidak mengalami apa yang telah mereka rasakan. Tapi alangkah mengkhawatirkan, justru kasus serupa muncul kembali di Jakarta.

Kurniasih mengingatkan, Komisi IX bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM sepakat melakukan penegakan hukum kepada industri yang terbukti melanggar standar sediaan farmasi.

BPOM mesti meningkatkan pengawasan terhadap sediaan farmasi mulai dari premarket dan postmarket.

Selain itu, ada kewajiban untuk memberikan santunan kepada keluarga korban dan jaminan pengobatan korban sampai sembuh.

"Saya ingatkan, dalam Undang-Undang kesepakatan kita antar Komisi dengan mitra kerja bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Jadi wajib dilaksanakan," tegasnya.

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan, Kemenkes akan mengeluarkan surat kewaspadaan kepada seluruh pihak terkait dengan adanya kasus baru gagal ginjal. Surat kewaspadaan ini ditujukan kepada dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan.

"Mengeluarkan surat kewaspadaan dengan tanda klinis gagal ginjal akut, dan penggunaan obat sirup meskipun penyebab kasus baru ini masih memerlukan investigasi lebih lanjut," ujar Syahril dalam keterangannya, kemarin.

Kemenkes juga bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), BPOM, ahli epidemiologi, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI, Farmakolog, para guru besar dan Puslabfor Polri menelusuri kasus ini.

Hal ini untuk memastikan penyebab pasti dan faktor risiko yang menyebabkan gangguan ginjal akut. "Sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampel obat dan darah pasien," pungkasnya. ■ TIF